



MAHASISWA BERJUANG

Catatan Perlawanan Mahasiswa

Edisi 3 / NOVEMBER - Januari



KAMPUS , LEMBAGA ANTI
DEMOKRASI ???



SERIKAT MAHASISWA INDONESIA



CONTENT

Mahasiswa Berjuang Edisi 3 / NOVEMBER 07 —JANUARI 08



Laporan Utama

Kenyataan pendidikan Indonesia yang perlahan-lahan masuk dalam cengkaman penjajahan modal, menjadi akar permasalahan yang mendorong perguruan tinggi menjadi sangat anti dengan KB3

Laporan Utama.....	4
Kapitalisasi pendidikan, merampas hak mahasiswa untuk berekspresi berpendapat, dan berorganisasi.....	
Opini	6
Kebebasan di tengah pasar bebas (Helmi Yadi - Ketua FPBJ)	
Gelora perjuangan.....	8
Sekilas Situasi	10
Imperialisme menghancurkan kehidupan rakyat Indonesia	
Laporan Khusus.....	13
Dikeluarkannya orang-orang kritis	
Belajar Berjuang.....	16
Apresiasi dan Budaya.....	18



MAHASISWA BERJUANG

Catatan Perlawanan Mahasiswa

Diterbitkan Oleh Komite Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia

Penanggung Jawab : Yusriansyah

Pemimpin Redaksi : Syahrir Burhanudin

Dewan Redaksi : Toni Triyanto , Medika Pahala , Syahrir Burhanudin ,Tomy Peden Tangkelembang , Eka Widya Weku , Miskan Soetardjo , Soekanti, Ainul Yakin, Andjar, Suardi.

Kontributor :

Robert (Medan), Danil (Bengkulu), Surya Soekarno (Jakarta), Maman (Pekalongan), Zivin (Semarang), Iron (Yogyakarta), Haki (Malang), Soli (Surabaya), Yadi (Mataram), Bimbim (Bima)

Alamat Redaksi : Jl. Jagakarsa, Gg Hidayah II, No. 5, Jakarta Selatan

Email : serikat_mahasiswa@yahoo.co.id

Phone: 021-99681453 dan 085693140191

Redaksi menerima saran Kritik, dan tulisan berupa naskah, artikel, berita, serta foto yang tidak bertentangan dengan garis perjuangan dan AD/ART SMI, Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah dengan, huruf Times New Roman 12, dalam format Word document, dan dikirim ke email redaksi.

? pembaca

Kenapa tidak ada satu rubrik khusus yang menganalisis perkembangan sitnas, Apakah memang Kebijakan Redaksi yang memang tidak mencantumkan atau bagaimana??.....

Pelanggan Setia MAJU, Di Surabaya

Sebagai pembaca dan sekaligus orang yang sering berhubungan dengan massa, saya agak sedikit kecewa atas lambatnya Edisi Ke-III Bulletin MAJU, Apakah Ada masalah serius sehingga terlambat???.

Pengurus Komisariat, Di UIN Malang

Semoga Bulletin MAJU Bukan Hanya Untuk Mahasiswa Saja.

Salam Perjuangan Untuk Redaksi MAJU

Saya adalah buruh yang bekerja di pabrik pengolahan bahan makanan di kawasan Cikarang, kebetulan saya juga pernah ngampus di *Akademi Pimpinan Perusahaan (APP)* di Jakarta. Saya cukup tertarik atas terbitnya MAJU milik SMI, apalagi buletin ini berskala nasional, tentu sulit untuk mengelola dengan tepat dari hal utama sampai lay-Out dan sirkulasinya, apalagi dengan dana yang seadanya (kadang ada, kadang engga –masalah klasik gerakan mahasiswa). Penilaian saya, sepertinya MAJU cuma mengangkat masalah mahasiswa saja. Padahal MAJU adalah buletin skala nasional, saran saya, bagaimana kalau redaksi menambahkan kolom khusus yang membahas dinamika gerakan rakyat lainnya, tentunya sebagai ruang untuk membangun dan membuka ruang-ruang konsolidasi yang lebih maju, supaya dapat membangkitkan semangat bersatu dan berjuang rakyat,.. Thanks.

Sugantino, aktivis buruh Di kawasan Industri Cikarang, Kab Bekasi.

Redaksi !

Terima kasih atas segala tanggapan yang diberikan oleh para pembaca MAJU...

Sebelumnya kami mohon maaf kepada seluruh pembaca setia MAJU atas keterlambatan Edisi III, hal ini dikarenakan kami masih dalam proses perapihan manajemen redaksi maju, tetapi kritik dari para pembaca telah mendorong kami untuk lebih konsisten dalam waktu penerbitannya. kami berusaha sekuat tenaga untuk terbit tepat waktu dalam edisi kedepan. Dalam edisi ini kami sudah menambahkan rubrik yang khusus membahas tentang situasi nasional, sebelumnya memang kami hanya mengangkat beberapa isu yang khusus dari perkembangan situasi nasional, tetapi atas permintaan pembaca dan kebutuhan dari beberapa cabang SMI kami akan mengulas secara menyeluruh perkembangan situasi nasional. Harapan kami edisi III MAJU, dapat memenuhi kebutuhan para pembaca untuk me-



Isuar a Pembaca



Merefleksi perkembangan gerakan di Indonesia, khususnya mahasiswa, maka redaksi MAJU memutuskan untuk menyajikan tema pokok yang mencerminkan seluruh isi dalam edisi III yakni ***Kekerasan Terhadap Gerakan Rakyat***. Tentu saja tema itu kami tetapkan dengan pertimbangan yang matang, karena saat ini memang patut dibongkar dan selanjutnya di kampanyekan secara luas muatan politik apa di balik skenario dan praktek Imperialisme Internasional dalam menghancurkan setiap gerakan massa yang baru tumbuh di negeri-negeri terjajah seperti Indonesia.

Kaum imperialisme yang dengan dukungan armada militernya saat ini, dihadapkan pada persoalan utama yaitu bagaimana dengan segala cara tetap mengendalikan struktur kekuasaan ekonomi, politik bahkan social budaya di dunia ini, agar kekuasaan yang dibangun dengan cara menindas dan menghisap nilai lebih dari hasil kerja produksi ratusan juta kaum buruh

sengketa agraria itu banyak yang masih belum di menangkan oleh kaum tani.

Di dunia perburuhan, Kaum buruh bersama organisasinya, justru adalah kelompok sekaligus kelas social yang kerap menjadi sasaran kekerasan dan penindasan yang di lakukan oleh negara atas “instruksi” Pemodal besar (dalam dan luar negeri). Hampir setiap hari terjadi PHK terhadap kaum buruh, Intimidasi dan dikriminasi terhadap serikat-serikat di tingkat pabrik yang baru tumbuh, lemahnya perlindungan hukum terhadap buruh, dan tidak layakny upah sekaligus jaminan sosial kaum buruh Indonesia dewasa ini.

Tentu masih segar dalam ingatan kita berbagai kasus penindasan dan kekerasan yang sering terjadi dalam bentuk kongkrit yakni perampasan hak-hak demokratis massa mahasiswa dan pelajar di dunia pendidikan dalam bentuk pelarangan aktivitas masuk



serta dengan hegemoni (pengaruh) budaya tidak jatuh kepada kekuatan kelas proletar dengan gerakan massanya.

Cerita panjang atas fakta tentang kekerasan di lapangan kerap kali terjadi di tahun-tahun terakhir ini adalah sebuah fenomena pertentangan yang penting untuk di cermati oleh seluruh gerakan demokratik di negeri ini. Menjadi penting untuk di cermati, karena hakekatnya actor yang melakukan kekerasan itu paling banyak di sponsori oleh Perusahaan-perusahaan besar yang meminjam otoritas alat represifitas negara. Dalam catatan yang dikutip dari data Konsorsium Pembaharuan Agraria, yang mentabulasi kasus kekerasan dan sengketa agraria yang terjadi di kisaran tahun 1970 - 2007 terdapat kurang lebih 2860 kasus kekerasan dan sengketa agraria. Dari ribuan kasus

dalam ormass progresif yang dianggap kampus sebagai organ Ekstra, Pembungkaman suara mahasiswa yang kritis dengan ancaman DO, Skorsing terus terjadi Sepanjang thn 2003-2007 dalam Data Base SMI sekurangnya terdapat 26 kasus kekerasan terhadap mahasiswa, Akar politik yang meyebabkan munculnya kekerasan dan pembukaman terhadap ormass mahasiswa salah satunya di dasari produk hukum yakni Penataan liberalisasi Pendidikan Nasional dalam Draft RUU-BHP yang paling lambat akhir tahun ini di sahkan, tentu saja kondisi di atas bagi redaksi melihat betapa kerasnya kontradiksi dalam pendidikan nasional yang mencerminkan praktek pendidikan nasional yang tidak demokratis, tidak ilmiah dan tidak memiliki keberpihakan terhadap rakyat.



Kapitalisasi pendidikan, merampas hak mahasiswa untuk berekspresi berpendapat, dan berorganisasi.

Menjelang akhir tahun 2007, wajah dunia Pendidikan Tinggi di Indonesia telah menjadi babak-belur. Selain dikarenakan semakin maraknya praktek liberalisasi dan privatisasi pendidikan (baca : kapitalisasi pendidikan) yang telah mengakibatkan berubahnya orientasi pendidikan menjadi profit oriented (mencari keuntungan financial), situasi pendidikan di Indonesia juga bertamabah parah oleh berbagai macam praktek represifitas di kampus.

Mulai dari terbunuhnya M.Ridwan mahasiswa IKIP mataram (mei -2006), penyerbuan kampus UISU di Medan, sampai maraknya kebijakan skorsing dan drop out yang menghambat masa depan mahasiswa. Pada bulan april – mei, terdapat 3 kasus skorsing & drop out sepihak terhadap mahasiswa, hanya karena mengkritik kebijakan kampus. Kasus tersebut terjadi di Univ Ahmad Dahlan (UAD-yogyakarta), dimana mahasiswa melakukan kritik terhadap kebijakan kampus melalui apresiasi seni, dan di Institute Teknologi 10 November (ITS- Surabaya) dimana mahasiswa menggelar “seminar jalanan” yang mengungkapkan keterlibatan ITS dengan PT. Lapindo Brantas terkait dengan proyek eksplorasi di Sidoarjo. Kebijakan yang paling anarkis terjadi pada bulan September di Universitas HKBP Nomensen dimana 32 mahasiswa diskros, dan 12 mahasiswa di DO, hanya karena kampus marah terhadap mahasiswa yang tidak sependapat kalau masa orientasi mahasiswa baru dilaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa. Beberapa kasus diatas hanya sebagian kecil dari banyak kasus yang menunjukkan mulai hilangnya kebebasan mahasiswa untuk berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi didalam kampus.

Melihat gambaran situasi kampus diatas, nampak bahwa aktifitas mahasiswa di kampus saat ini cenderung dihambat oleh birokrasi kampus, mulai dari aktifitas politik mahasiswa untuk memperjuangkan hak-haknya di kampus, aktifitas seni, sampai aktifitas sosial juga mengalami hambatan dari pihak kampus. Prilaku represif dari birokrasi kampus saat ini tentunya merupakan cerminan

dari watak birokrasi kampus yang semakin otoriter. Dari beberapa tindakan represif birokrasi kampus tersebut memiliki kesamaan pola, yaitu dengan berbagai macam peraturannya (SK Rektor, SK. Dekan, peraturan kampus), serta tuduhan bahwa aktifitas mahasiswa untuk memperjuangkan hak-haknya, dan mengkritik kebijakan kampus adalah tindakan yang mencemarkan almamater, dan nama baik perguruan tinggi.

Demokratisasi, dan kebebasan berekspresi di kampus.

Pendidikan yang demokratis, adalah pendidikan yang mengarahkan manusia untuk mengenali realitas dirinya dan dunianya, pendidikan tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, dimana mahasiswa terlibat dalam menentukan apa dan bagaimana proses pendidikan di Perguruan tinggi dilaksanakan. Dengan prinsip tersebutlah pendidikan akan berfungsi untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Dalam proses mewujudkan hal tersebut, tentunya mahasiswa membutuhkan ruang untuk berekspresi, mengembangkan kemampuan dan pemahamannya, serta berpendapat tentang realitas sosial yang sering bertentangan dengan apa yang mereka pelajari, serta berorganisasi sebagai cara untuk memperjuangkan hak dan keyakinan mereka atas suatu pemikiran.

Hak setiap warga negara untuk berekspresi, berpendapat dan berorganisasi sebenarnya sudah menjadi Hak Asasi Manusia yang diatur didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta diatur didalam UUD 45 pasal 28. Hal tersebutlah yang menjadi landasan bahwa mahasiswa tentunya juga mempunyai hak dalam mendapatkan kebebasan untuk berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Maka menjadi hal yang mutlak bahwa kebebasan, berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, menjadi suatu keharusan dari suatu proses demokratisasi. Dengan adanya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi maka kesadaran mahasiswa akan perannya didalam kampus tentunya akan meningkat.



Kapitalisasi dan depolitisasi menghambat kreatifitas mahasiswa

Akan tetapi realitas pendidikan di Indonesia ternyata sangat jauh dari proses memanusiakan manusia. Kenyataan pendidikan Indonesia yang perlahan-lahan masuk dalam cengkraman penjajahan modal, menjadi akar permasalahan yang mendorong perguruan tinggi menjadi sangat anti dengan KB3, terlebih lagi ketika aktifitas mahasiswa tersebut merupakan bentuk reaksi mahasiswa yang merasa hak-hak normatifnya belum dipenuhi oleh birokrasi kampus. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus pengekangan terhadap KB3, terjadi di beberapa perguruan tinggi yang sudah dan sedang dalam proses menuju suatu Badan Hukum Pendidikan (BHP), sebut saja UI, ITB, ITS, USAKTI, dll. BHP sebagai perusahaan yang beroperasi di sector pendidikan, sudah layaknya seperti perusahaan yang tidak menginginkan buruh berorganisasi untuk memperjuangkan kesejahteraan karena akan mengurangi keuntungannya. Dari hal tersebut dapatlah dilihat bahwa represifitas yang semakin marak terjadi di kampus, juga terjadi seiring dengan proses persiapan kampus dalam “memodernisasi” dirinya dengan berbagai kebijakan baru sebagai bentuk persiapan mereka mengejar syarat-syarat dari BHP. Upaya tersebut seringkali dilakukan dengan mengesampingkan permasalahan konkrit yang dihadapi oleh rakyat (biaya kuliah meningkat ditengah kemiskinan rakyat Indonesia). Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya aksi-aksi mahasiswa di kampus sebagai bentuk reaksi dari pertentangan kepentingan kampus dengan kemampuan dan harapan masyarakat atas pendidikan tinggi..

Dalam menjalankan praktek kapitalisasi pendidikan tentunya pemerintah juga sudah mempersiapkan aturan yang menekan gejolak perjuangan massa yang lahir di kampus. SK. Dikti No. 26 Tahun 2002, tentang organisasi mahasiswa, mengatur bahwa organisasi massa dilarang untuk melakukan aktifitas didalam kampus. Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk kooptasi negara terhadap kekuatan mahasiswa, dimana hanya mahasiswa yang tunduk dalam kekuasaan birokrasi kampuslah yang diberi ruang untuk beraktifitas didalam kampus. Hal tersebut senada dengan pendapat Mendiknas Bambang Sudibyo yang mengatakan bahwa “aktifitas politik

mahasiswa adalah tindakan yang tidak berguna” (dalam kompetisi robot nas di ITS).

Karakter birokrasi yang begitu represif terhadap mahasiswa memang merupakan karakter birokrasi kampus yang terbentuk dari proses depolitisasi, hasil dari kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978 yang dikeluarkan oleh rezim otoriter Soeharto, Hal inilah yang dimanfaatkan oleh imperialisme, dalam membersihkan kampus dari segala kekuatan mahasiswa yang mempunyai kecenderungan menghalangi kepentingan mereka.



Mewujudkan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi

Dalam mewujudkan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi tentunya tidak dapat diperoleh tanpa melalui proses perjuangan massa. Selain dari kebijakan negara dan birokrasi kampus Situasi yang menghambat diwujudkannya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi adalah terpisah-pisahannya perjuangan organisasi mahasiswa saat ini, mitos bahwa organisasi ekstra mengancam keberadaan organisasi intra sebenarnya tidak terbukti, kenyataannya bahwa cukup banyak pimpinan-pimpinan organisasi intra kampus berasal dari organisasi “ekstra”. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi ekstra memang memberikan kontribusi terhadap sistem demokrasi didalam kampus. Artinya keberadaan organisasi ekstralah yang menghidupkan dinamika demokrasi didalam kampus.



"KEBEBASAN" DI TENGAH PASAR BEBAS

pandangan buruh terhadap kekerasan terhadap gerakan rakyat



Helmi Yadi

Ketua umum Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ), serta Ketua ABM-Bekasi, bekerja sebagai buruh di PT. Sintertech Indonesia—Cikarang.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat untuk mencapai kesejahteraan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang menjadi motivasi para pejuang Indonesia dulu untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Tapi meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari 60 tahun ternyata kesejahteraan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang saja rakyat Indonesia

Motivasi yang sama juga mendorong para pemuda pada masa orde baru, untuk terus melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto. Puncak perlawanan terhadap rezim Soeharto yaitu pada bulan Mei 1998, pada saat jutaan rakyat Indonesia yang terdiri dari buruh, tani, pemuda, yang dimotori oleh mahasiswa melakukan perlawanan yang hasilnya adalah jatuhnya pemimpin besar orde baru yang anti rakyat Jendral H M Soeharto.

Hasil dari Reformasi 1998 hanyalah pergantian segelintir pemimpin yang sekarang duduk onggang-onggang kaki di kantor kepresidenan, DPR dan kantor pemerintahan yang lainnya. Apa yang mereka berikan dan perbuat bagi kesejahteraan seluruh Rakyat

Indonesia...?

Pada sektor Perburuhan :

1. Upah buruh yang murah

Pengusaha merupakan orang yang memiliki kepentingan terbesar atas kerja buruh. Mereka tidak pernah peduli akan kehidupan buruh, yang mereka ketahui hanyalah kehadiran buruh dalam pabrik untuk bekerja sehari-hari. Soal cukup tidaknya upah yang diterima oleh buruh dalam pabrik tidak pernah di pikirkan oleh pengusaha. Mereka juga tidak pernah memperdulikan kesehatan jasmani maupun rohani para buruh maupun keluarganya ketika bekerja sehari-hari di pabrik

2. Tidak adanya kepastian kerja.

Tidak adanya jaminan kepastian kerja juga merupakan hasil dari rezim yang berkuasa. Dengan tidak adanya jaminan kerja, banyak buruh menjadi tidak nyaman karena sewaktu-waktu dapat di PHK tanpa adanya kompensasi apapun. Tingginya jumlah angkatan kerja dan minimnya lapangan kerja yang tersedia membuat banyak perusahaan mempergunakan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang sering disebut oleh SBY sebagai tenaga kerja yang luwes. Maraknya buruh kontrak dan outsourcing menyebabkan banyak perusahaan mengganti sistem kerja diperusahaannya, dari buruh tetapnya dengan buruh kontrak, yang lebih

mudah di-PHK, tanpa uang penghargaan massa kerja dan pesangon.

3. Tidak ada jaminan Kebebasan Berserikat.

Kebebasan berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang ternyata tidak menjamin buruhnya bebas berserikat. Buktinya dapat dilihat di Lampung Serikat Buruh Tirta Daya Bersatu (SBTB), atau PT Unipack Indosystems (WINGS GROUPS) di Bekasi, dimana managementnya melarang buruh untuk berserikat, karena dianggap akan menjadi penghambat perusahaan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari tenaga buruh.

4. Masih di represifnya buruh oleh alat kekuasaan negara.

Di zaman Orde Baru buruh tidak boleh berserikat apalagi menuntut kesejahteraan. Lihat saja kasus marsinah yang dibunuh oleh tentara ketika menuntut kenaikan upah. Di jaman Soeharto serikat buruh hanya boleh satu saja yaitu SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Upah di buat serendah-rendahnya, UU juga hanya sebagai pajangan tanpa pernah

“managementnya melarang buruh untuk berserikat, karena dianggap akan menjadi penghambat perusahaan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari tenaga buruh”.



dilaksanakan. Polisi dan tentara dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.

Apakah ada perubahan saat ini...?

Setelah reformasi, ternyata upah buruh masih sangat rendah, meskipun di UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan disebut dengan kebutuhan hidup layak. Buruh dibuat terpecah dengan penentuan upah minimum dan upah minimum sektoral yang mengakibatkan dua suara dalam penentuan upah. Anti serikat buruh yang dilakukan oleh management hanya ditanggapi dengan diam, malah aparat ikutan mengintimidasi buruh agar tidak macam-macam dengan ancaman penjara dan senjata. Intimidasi dalam fisik dan pemikiran juga terjadi pada teman-teman buruh, yaitu buruh hanya boleh tau soal kerjanya sehari-hari saja, soal kesejahteraan buruh tidak boleh memikirkannya apalagi menuntut.

Dalam gelombang perlawanan yang dilakukan oleh buruh untuk menuntut haknya yang dirampas oleh pengusaha dan penguasa, buruh selalu dihadapkan dengan polisi, preman, tentara dan aparat pemerintahan. Hal ini terjadi di pabrik baja PT. Master Stell—Tangerang, ketika pengusaha kabur, polisi malah menjaga aset pengusaha yang kabur, ketika buruh menuntut haknya...polisi malah

mengusir buruh dengan paksa....di Malang juga terjadi di Pabrik Adi Putro di mana polisi membubarkan paksa aksi demo yang sah menurut UU dengan cara kekerasan.

Apa yang terjadi di kawan-kawan buruh juga terjadi oleh kawan-kawan Mahasiswa....

Mahasiswa di paksa untuk berfikir dan bertingkah laku mendukung pengusaha, sehingga ketika lulus, mahasiswa bukan mempergunakan ilmunya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi malahan ikut-ikutan mempergunakan ilmunya untuk menindas buruh dan membodohi buruh. Ini adalah bentuk represif negara dalam bentuk kebebasan berpikir.

Ketika ada mahasiswa yang coba-coba menyuarakan kenyataan yang terjadi di masyarakat malah dianggap aneh...munafik...sok aktivis....bahkan di Fakultas Hukum Universitas Trisakti mahasiswa yang memperjuangkan perbaikan fasilitas pendidikan di kampus, dicari-cari kesalahannya dan dipersulit urusan akademiknya, di intimidasi psikologisnya dan diancam DO.

Mengapa penguasa negeri ini tidak berpihak kepada Rakyat Indonesia ?

Dari kebijakan yang mereka keluarkan jelaslah, bahwa keberpihakan mereka adalah kepada para pemilik

modal, dengan dukungan polisi, tentara, dan aparat pemerintah lainnya. Sumber Daya Alam Indonesia yang kaya raya dan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta membuat para pemodal sangat berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia.

Masuknya modal ke Indonesia selama ini juga tidak lepas dari janji pemerintah Indonesia akan jaminan keamanan dan tersedianya tenaga kerja murah.

Organisasi-organisasi Internasional seperti IMF, Bank Dunia, WTO, adalah organisasi yang gunanya untuk melancarkan

Mahasiswa dipaksa untuk berfikir & bertingkah laku mendukung pengusaha, Ini adalah bentuk represifitas negara dalam bentuk kebebasan berpikir.

modal di Indonesia. Mereka telah menguasai pemerintah Indonesia untuk melanggengkan dilaksanakannya jaminan keamanan untuk berinvestasi. Pemerintah Indonesia sebagai anak manis organisasi tersebut, langsung membuka ruang seluas-luasnya untuk berinvestasi dengan perlindungan lembaga-lembaga represif seperti polisi, tentara dll.

Semua ini adalah bentuk kebebasan ala Neo Liberalisme, maka sudah bebas atau

DILARANG MELINTAS GARIS POL
DO NOT CROSS
POLICE LINE



September

6 Jakarta, Bertepatan dengan hari pemberantasan buta aksara Internasional. SMI, FMN dan beberapa organisasi lain menggelar aksi massa yang di ikuti oleh 200 an orang, dalam aksinya mereka menuntut Realisasi anggaran pendidikan 20 %, Tolak RUU BHP, Peningkatan kesejahteraan bagi guru, karyawan dan dosen, Serta Tolak Kebijakan Ujian Nasional. Massa aksi long march dari patung kuda menuju Istana Negara, namun belum sempat sampai didepan Istana massa aksi dihadang aparat polisi dan akhirnya massa aksi mendatangi kantor Depdiknas, beberapa perwakilan mahasiswa masuk dan bertemu dengan Humas Dikti.

13-17 Yogyakarta, Mahasiswa Isi (Institute Seni Indonesia) yang tergabung dalam GEMAS (Gerakan Mahasiswa ISI) bersama dengan SMI, FMN melakukan aksi massa untuk menuntut kebijakan pencabutan pembatasan massa studi oleh rektorat. Massa sempat menguasai kampus, sebagai bentuk tekanan terhadap rektorat. aksi massa tersebut pada juga mendapatkan dukungan dari AMP, GMNI, dan HMI. Selain menuntut pencabutan SK. Rector, mahasiswa juga menuntut agar pembayaran SPP disesuaikan dengan ketentuan panduan akademik, serta pelibatan mahasiswa dalam mengambil kebijakan.

20 Medan, Rektor Universitas HKBP. Nomensen mengeluarkan keputusan skorsing terhadap 32 mahasiswa, serta DO, terhadap 12 mahasiswa. Kebijakan rector yang anarkis ini dilakukan setelah mahasiswa mempertahankan hak-hak demokratisnya untuk tetap terlibat dalam penyelenggaraan Masa Orientasi Mahasiswa (07-08). Setelah kebijakan ini dikeluarkan mahasiswa yang tergabung dalam KB-UHN melakukan aksi massa di Kampus, untuk menuntut pencabutan keputusan Skorsing, & DO, serta perbaikan fasilitas kampus.

oktober

24-25 Semarang, Tepatnya di kampus UNISSULA terjadi aksi massa selama 2 hari berturut-turut, pada hari pertama massa aksi berjumlah 100 mahasiswa dan hari kedua diikuti oleh 300 mahasiswa. Aksi massa diikuti oleh SMI Komisariat Unissula, LKM, BEM-PT dan BEM di tiap-tiap fakultas yang tergabung dalam AL-MA'UN (Aliansi Mahasiswa Unissula) tersebut menolak kebijakan kampus tentang pelarangan Pemakaian Jeans bagi semua mahasiswa, yang mana kebijakan tersebut satu paket dalam program BUDAI (Budaya Akademik Islami) yang menjadi keputusan Rektor UNISSULA. Mereka mendatangi kantor Rektorat sambil menyampaikan orasinya silih berganti, dan akhirnya pihak Rektorat bersedia menemui massa aksi untuk kemudian audensi. Setelah didesak oleh mahasiswa akhirnya kebijakan tentang pelarangan pemakaian jeans tersebut di cabut kembali. Hal ini merupakan bentuk kemenangan kecil yang harus dikabarkan kepada massa luas.



NOVEMBER

2007

6 Surabaya, puluhan anggota SMI Komisariat UNESA melakukan aksi mimbar bebas di kampus dalam rangka mengusung kampanye Jaminan Kebebasan Berekspresi, Berpendapat dan Berorganisasi di kampus, mereka memandang situasi kampus hari ini tidak demokratis dan sering mengekang serta memberangus hak-hak mahasiswa. Dengan gegap gempita dan penuh semangat mereka berorasi bergantian dan membagi selebaran kepada mahasiswa.

29 Surabaya, anggota SMI Komisariat IAIN Sunan Ampel menggelar aksi massa di kampus dalam rangka menuntut peningkatan kualitas pendidikan yang didalamnya juga terkait peningkatan fasilitas kampus untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa. Aksi tersebut mendapatkan respon positif dari massa mahasiswa, karena banyak mahasiswa yang juga ikut membagi-bagi selebaran dan mengikuti acara mimbar bebas tersebut.



Selamat Dan Sukses
Atas Berdirinya SMI Cabang Medan,
Majukan Perjuangan Massa
Di Kampus !
Galang Perjuangan Pembebasan Na-
sional Melawan IMPERIALISME !

Mari Persiapkan Diri Menuju
“Aksi Massa Nasional Terpusat”
Dalam Rangka Kampanye
“Jaminan Kebebasan Berekspresi, Ber-
pendapat dan Berorganisasi di Kampus”
Yang akan diselenggarakan pada :
14 February 2008, di Jakarta.



“Imperialisme”, menghancurkan kehidupan rakyat Indonesia..

Saat ini AS dan klik Uni Eropa menjadi kekuatan negara imperialis yang paling dominan di dunia. Nafsu serakah untuk menguasai sumber energi (terutama minyak), over produksi persenjataan dan peralatan berteknologi tinggi yang dialami AS, telah mengakibatkan suatu bencana besar ekonomi dan kemanusiaan. Terjadinya krisis umum imperialisme saat ini bisa ditemukan dalam berbagai proyek kepentingan imperialis, seperti privatisasi dan pemotongan subsidi bagi rakyat, sistem pasar buruh fleksibel, sampai invasi militer di Irak, Afganistan, Lebanon, dan Palestina serta ketegangan politik Timur Tengah. Semua itu merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa imperialisme sedang mengalami krisis. Penghancuran kedaulatan dan perang yang diciptakan Negara-negara dunia pertama telah membunuh jutaan manusia di seluruh dunia, langsung maupun tidak langsung. Perang telah menjadi biang dari bencana kelaparan yang tidak berkesudahan seperti di Irak. Bersamaan dengan itu, kaki-kaki imperialis di dalam negeri meningkatkan penindasan dan penghisapan terhadap rakyatnya. Bila tidak, mereka akan kehilangan lahan basah sebagai rezim boneka dan selamanya berada di bawah ancaman teror imperialis atau invasi militer secara langsung.

Proses dialektika dalam situasi krisis ini memunculkan

perlawanan rakyat yang semakin luas dan kuat sebagai jawaban terhadap penghisapan dan penindasan imperialisme dan kelas-kelas reaksioner di dalam negeri. Venezuela, Bolivia, Nepal, India, Filipina, Palestina, Lebanon, Iran, serta rakyat di Negara-negara dunia pertama sendiri, baik di Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Kebangkitan rakyat yang ditandai



dengan terseingkirnya rezim-rezim reaksioner boneka imperialis oleh wakil-wakil dari kekuatan populis seperti Chavez dan Evo Morales, adalah pertanda positif dari pihak rakyat. Kita juga menyaksikan aksi-aksi terorganisir rakyat dari berbagai negeri, yang semakin keras menyerang seluruh forum-forum yang disokong oleh imperialisme; World Economic Forum (WEF), International Monetary Fund (IMF), World

Trade Organization (WTO) dsb. Dapat dipastikan bahwa forum-forum mereka selalu mendapatkan kecaman dan perlawanan rakyat di belahan dunia ini. Hal ini menandakan semakin tingginya kesadaran massa rakyat dan meningkatnya gelombang perlawanan. Bahkan gelombang protes juga turut mewarnai gerakan buruh transportasi di Perancis dan Jerman dalam menuntut tunjangan pensiun dan peningkatan upah beberapa waktu terakhir ini, karena pada hakekatnya tangan-tangan besi kapitalisme tidak akan sanggup menyembunyikan watak penghisapan yang dilakukan terhadap kelas buruh.

Kenaikan harga minyak dunia, dan pemanasan global

Melonjaknya harga minyak dunia yang hampir mencapai 100 juta/barel yang berdampak pada kenaikan harga BBM industri dalam negeri sekitar 10-30 %, artinya hal ini akan dijadikan alasan bagi para pengusaha dan pemerintah untuk menekan upah buruh serendah mungkin karena cost produksi bertambah. Indonesia sendiri selaku negara penghasil minyak, ternyata tidak sanggup berbuat apapun dengan naiknya harga minyak dunia, karena sumber daya minyak di Indonesia banyak di monopoli oleh MNC/TNC.

Sementara itu Pemerintah sedang sibuk mempersiapkan diri



sebagai tuan rumah KTT Perubahan Iklim yang akan dilaksanakan di Bali. Hal ini sebenarnya penuh dengan muatan kepentingan AS dan negara – negara imperialis lainnya. Seolah-olah masalah perubahan iklim yang terjadi dewasa ini menjadi tanggung jawab semua negara didunia (termasuk Indonesia), padahal penyebab utama pemanasan global (global warming) adalah tingginya aktifitas industri yang berasal dari AS selaku negara industri maju dan banyak menyerap cadangan minyak dunia, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi ladang eksploitasi minyak AS.

Proses Liberalisasi di sector perburuhan

Kebijakan labour market flexibility (LMF) yang sedang digalakkan dalam sector perburuhan Indonesia semakin memberangus hak-hak kaum buruh, bermacam regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang perburuhan menjadi legalitas atas penjajahan gaya baru. UU No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan adalah tonggak liberalisasi atas sistem perburuhan dimana dalam UU tersebut mengatur tentang Sistem

kerja kontrak dan system Outsourcing. Setelah diberlakukannya UUK No. 13 Tahun 2003, mulailah dirasakan secara langsung dan massif dampak dari LMF tersebut, meskipun sebelumnya ada proyek percobaan untuk menciptakan fleksibilitas ini melalui Peraturan Menteri (PERMEN) tentang KKWT (Kesepakatan kerja Waktu Tertentu), juga untuk memudahkan perubahan status awalnya dibuatlah kebijakan melalui KEPMEN 150 tahun 2000 tentang pesangon yang dibesarkan nilainya. Benarkah ini sebagai perlindungan? Kenyataannya adalah begitu marak PHK massal setelah regulasi tersebut dikeluarkan. Namun intinya adalah berubahnya status kerja buruh dari tetap menjadi kontrak. Dari yang ada perlindungan dan jaminannya menjadi tidak ada. Juga dalih relokasi selain mencari UMK yang rendah, agenda utamanya tetap perubahan status. Meskipun pada beberapa tahun terakhir, begitu banyak pengusaha yang tidak mau membayar pesangon sesuai aturan yang akhirnya diakomodir dalam UUK, oleh karena buruh yang berubah statusnya menjadi kontrak menjadi sangat besar jumlahnya. UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh dalam prakteknya juga tidak memberikan jaminan atas kebebasan berserikat bagi buruh, hal ini terbukti ketika masih marak terjadi praktek pembrangusan serikat. UU No 2 Tahun 2004 Tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) juga tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan kaum buruh, terbukti ketika dalam PHI putusannya lebih

banyak memenangkan pengusaha. Belum lagi upaya pemerintah untuk mengesahkan RPP (rancangan peraturan pemerintah) tentang Pesangon yang akan digunakan sebagai legalitas bagi para pengusaha untuk melakukan PHK sehingga akan semakin memperbesar jumlah pengangguran yang saat ini sudah mencapai 40 juta jiwa.

PPAN dan liberalisasi sector agraria.

Begitu pula kebijakan rezim yang berdampak pada kaum tani yang tidak punya tanah, justru semakin memperlemah gerakan tani hari ini. Kebijakan PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang rencananya akan membagi-bagi tanah seluas 9 juta hektar. Dalam situasi ekonomi politik hari ini tentu saja tanah yang dibagi-bagikan dengan sistem sertifikasi hak milik tersebut akan kembali jatuh ke tangan pemilik modal yang sanggup membeli tanah-tanah tersebut. Hal tersebut akan terjadi, karena situasi perekonomian didesa juga tidak kunjung membaik, kaum tani yang masih jauh dari kesejahteraan akan terhimpit tingginya harga kebutuhan, dan akhirnya akan menjual tanahnya kembali. Belum lagi dalam mekanisme pembagian tanah tersebut tidak melibatkan serikat tani dalam menentukan subyek maupun obyeknya. Persoalan ketimpangan agraria di Indonesia ini salah satunya juga disebabkan karena tidak dilaksanakannya UUPA No 5 Tahun 1960. selain itu penguasaan tanah melalui mekanisme HGU (Hak Guna Usaha) juga semakin mempersempit akses petani miskin untuk memiliki tanah dan lebih banyak dikuasai oleh



PT Perkebunan. Itulah mengapa sampai hari ini 60 % dari jumlah petani Indonesia hanya memiliki tanah tidak lebih dari 0,2 hektar saja.

Liberalisasi di sector pendidikan.

Karakter ketetertundukan terhadap imperialisme sudah sangat jelas tercermin dalam tindakan Pemerintah Indonesia, karena Indonesia sendiri salah satu negara yang antusias menyambut liberalisasi perdagangan jasa pendidikan Dalam pertemuan di Jenewa, Desember 2004, Indonesia telah melakukan initial request (permintaan pembukaan sektor-sektor jasa di negara lain) dan initial offer (penyerahan sektor-sektor di dalam negeri untuk dibuka atau diperdalam komitmennya bagi pemasok asing) kepada negara-negara anggota WTO lainnya. Ada tiga negara yang menjadi eksportir jasa pendidikan yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris dan Australia. Negara-negara inilah yang paling diuntungkan dalam liberalisasi jasa pendidikan. Tidak mengherankan jika tiga negara tersebut saat ini sangat agresif menuntut sektor jasa pendidikan melalui WTO dengan beberapa model perdagangan jasa pendidikan yang akan digunakan sesuai dengan kerangka GATTs / General Agreement on Tariff and Trade services (persetujuan umum mengenai perdagangan jasa).

Rezim Boneka Imperialis yang berkuasa di Republik ini selalu memposisikan dirinya sebagai regulator atas kepentingan imperialisme yang kemudian

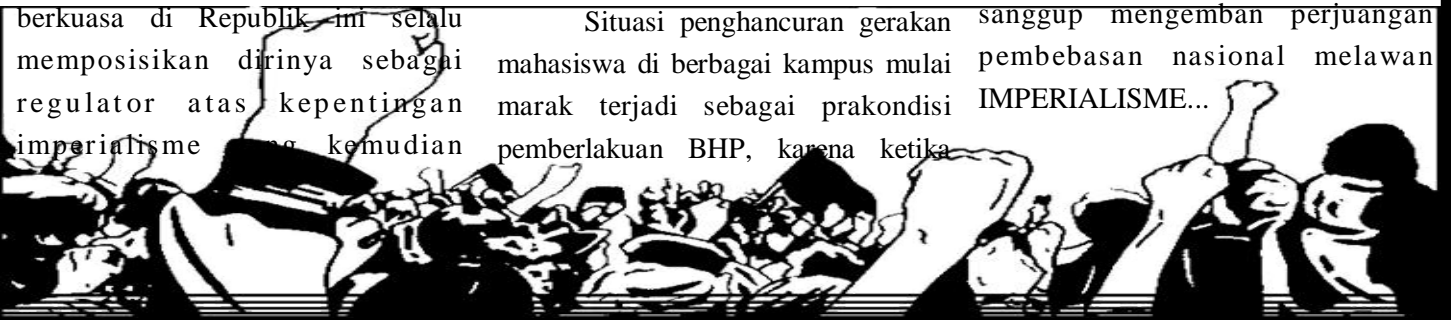
mendapatkan legalitas atas segala Undang-Undang sebagai instrument penting dalam konteks penjajahan baru saat ini. Berbagai peraturan dan Undang-Undang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR-RI terutama regulasi yang menyangkut kepentingan bisnis sektor jasa pendidikan di Indonesia. Maraknya Undang-Undang, maupun yang masih bersifat rancangan telah tersaji didepan mata sehingga semakin membuat ruwet persoalan didunia pendidikan nasional kita semisal; PP.60 Tahun '99 tentang Perguruan Tinggi, PP. 61 Tahun '99 tentang Perguruan Tinggi Negeri Sebagai BHMN, UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003, Sangat jelas Undang-Undang Sisdiknas justru hendak menggerakkan pendidikan nasional kita pada arah liberalisasi. Belum lagi RUU BHP yang sedang digodok di DPR-RI, kesemuanya itu jelas untuk memfasilitasi kepentingan modal imperialisme. Kebijakan Ujian Nasional yang digunakan sebagai standarisasi kualitas kelulusan siswa juga menjadi permasalahan, padahal secara infrastruktur pendidikan masih banyak ketimpangan antara sekolah didaerah yang satu dan daerah lainnya, sehingga ketika harus dipukul rata dengan Ujian Nasional jelas hasilnya banyak yang tidak lulus.

Represifitas terhadap gerakan mahasiswa di kampus.

Situasi penghancuran gerakan mahasiswa di berbagai kampus mulai marak terjadi sebagai prakondisi pemberlakuan BHP, karena ketika

BHP sudah dijalankan maka kekuatan progressif mahasiswa akan melakukan perlawanan terhadap birokrasi kampus, tentu saja rezim hari ini hendak melakukan Depolitisasi terhadap mahasiswa agar tidak bisa berbuat banyak dan menjadi sapi perahan di kampus-kampus. Ketika mahasiswa mulai menuntut hak-haknya di kampus maka kebijakan skorsing dan DO menjadi alat pemukul yang efektif dan mempersempit ruang gerak mahasiswa.

Memasuki tahun 2008 merupakan momentum bagi para elite politik borjuasi untuk melakukan persiapan guna kepentingan politik elektoral 2009 untuk menarik simpati rakyat dan menggiringnya pada euforia demokrasi liberal yang jelas-jelas hanya untuk kepentingan para elite politik borjuasi, disatu sisi situasi gerakan buruh juga sudah mulai bangkit dan mengkonsolidasikan kekuatannya walaupun sebenarnya masih bergerak pada level perjuangan sosial ekonominya namun setidaknya hal ini bisa didorong untuk prakondisi membangun satu konsolidasi gerakan yang massif, harapannya bisa mendorong kekuatan berlawanan di sektor rakyat lain baik di gerakan tani, gerakan mahasiswa maupun kalangan borjuis kecil progressif lainnya untuk bersatu dan berhimpun dalam satu konsolidasi gerakan rakyat sebagai kekuatan alternatif yang kedepan sanggup mengemban perjuangan pembebasan nasional melawan IMPERIALISME...





Dikeluarkan (nya) Orang –orang kritis

Sebuah kajian terhadap ketentuan Drop Out dan Skorsing dalam dunia pendidikan

Fenomena kebijakan DO (Drop Out/dikeluarkan) dan skorsing akhir – akhir ini nampaknya “ marak “ di terapkan di beberapa kampus, kasus yang cukup “ hangat “ yaitu kebijakan men- skorsing 3 mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di karenakan mereka melakukan seminar ‘jalanan’ & aksi kampus mengenai Lumpur Lapindo (Kasus – kasus DO / Skorsing dapat di lihat di table). Nampaknya fenomena tersebut menjadi suatu hal yang akan terus ada di dunia pendidikan kita hari ini, selama sistem pendidikan kita “ masih tersesat” jauh dengan apa yang menjadi filosofi / paradigma pendidikan secara kritis & pedagogis. Pertanyaan tepat atau tidaknya mekanisme DO/Skorsing dalam dunia pendidikan sebagai lembaga yang mendidik dan ilmiah, haruslah di jawab dengan landasan sosiologis masyarakat dan tentunya filosofis pendidikan itu sendiri.

Menurut Paulo Freire pendidikan adalah proses humanisasi, humanisasi atau menjadi manusia sejati atau otentik adalah fitrah ontologis manusia. Penyimpangan atau pengingkaran atas hal itu adalah dehumanisasi. Dari analisis demikian, pendidikan baginya kemudian di maknai sebagai ‘ proses memanusiakan manusia kembali’, atau dengan kata lain membebaskan manusia dari keadaan dehumanisasi yang telah menindas

dan merenggut kemanusiaannya, yang membuatnya teralienasi dan menjadi sekedar obyek dari proses sejarah kehidupannya sendiri.

Pendidikan menurutnya harus menjadi praktek pembebasan yang membawa kepada kesadaran untuk menjadi subyek atau pelaku yang bertanggung jawab. Pendapat ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan sistem dan struktur sosial yang melingkupinya. Pendidikan dapat berperan penting untuk melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial (status quo) yang ada, juga dapat pula menjadi proses bagi perubahan sosial yang lebih adil.

Raharjo et.al. menyatakan bahwa “ peran pendidikan terhadap sistem dan struktur sosial tersebut sangat bergantung pada paradigma pendidikan yang mendasarinya”. Karena itu untuk memahami model suatu proses pendidikan dan memproyeksi implikasi dan hasilnya baik secara individu atau kolektif, maupun untuk memahami realitas sosial secara umum, dapat di lakukan dengan menganalisa pilihan paradigma yang di jadikan dasar bagi institusi pendidikan. Dari sini dapat diasumsikan bahwa konsepsi paradigmatic seorang mahasiswa (peserta didik)mengenai sesuatu hal, sedikit banyak ada relasinya dengan pola paradigma yang dianut dalam proses pendidikan yang diikutinya.

Menurut Paulo Freire Paradigma kesadaran Masyarakat dengan peran pendidikan di bagi menjadi 3 macam :

(1) paradigma kesadaran magis (magical consciousness). Yakni suatu tingkat kesadaran yang belum mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya kaitan antara kemiskinan dengan faktor sistem ekonomi dan politik. Penyebab ketidakberdayaan lebih dilihat sebagai faktor di luar manusia (natural / supranatural). Dalam perspektif Freire , konsep pendidikan disini disebut pendidikan fatalis. Karena peserta didik secara dogmatis menerima ‘ kebenaran’ dari pengajar / guru / dosen tanpa ada mekanisme untuk memahami makna ideologi dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

(2) Paradigma kesadaran naif (nival consciousness), pada tingkat kesadaran ini aspek manusia lebih





dilihat sebagai akar penyebab masalah, masyarakat tidak ada kaitannya dengan sistem atau struktur yang ada. Sistem dan struktur yang ada bahkan dianggapnya sudah baik dan benar, sudah 'given' jadi tidak perlu di pertanyakan. pendidikan disini kemudian bertugas (batas maksimal semester, absensi, membuat dan mengarahkan agar

Dari peruntukan keputusan DO, dan skorsing, 60 % diberikan kepada mahasiswa yang melakukan aktifitas politik di dalam kampus.

peserta didiknya menjadi dapat beradaptasi dengan sistem "yang benar" tersebut.

(3) Paradigma kesadaran Kritis (*critical consciousness*), melihat lebih kepada aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Menghindari *blaming the victims* (menyalahkan manusia yang justru menjadi korban sistem). Maka pendidikan baginya adalah proses untuk melatih peserta didik agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dari sistem dan struktur yang ada, menganalisis mekanisme kerjanya, serta berusaha merumuskan bagaimana mentransformasikannya menjadi tata kehidupan yang lebih adil.

Berdasarkan analisa mengenai paradigma serta filosofis pendidikan diatas maka kita akan melihat arahan pendidikan kita hari ini dengan fenomena – fenomena yang terjadi didunia pendidikan khususnya fenomena mengenai maraknya mekanisme DO/ Skorsing. Hasil pandangan mahasiswa berdasarkan polling yang telah dilakukan serta data – data yang di peroleh men-

genai DO/Skorsing menunjukkan bahwa rata – rata mekanisme DO/ Skorsing di berlakukan sekitar 60% terhadap aktifitas politik mahasiswa (Diskusi, Aksi, Mimbar bebas, kegiatan berorganisasi, dll), 20 % terhadap permasalahan akademik (batas maksimal semester, absensi, dll) dan 10% terhadap permasalahan kriminal (Narkoba, perkelahian, pencurian, dll).

Terlihat jelas bahwa penerapan mekanisme DO/Skorsing di lakukan dalam upaya meredam kesadaran kritis peserta didik, hal ini di akui juga oleh Ketua Jurusan sekaligus Dosen Psikologis pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dra. Evita Adnan.M.psi yang menjelaskan bahwa mekanisme Hukuman DO/ Skorsing terhadap aktifitas politik yang di lakukan oleh mahasiswa adalah tindakan yang tidak tepat, karena menurutnya hukuman tersebut tidak dalam proses membangun ataupun mendidik, melainkan malah mematikan ketajaman dan kekritisan berpikir mahasiswa itu sendiri, Mahasiswa dalam berpikir dan bertindak sudah dalam tahapan memiliki kode moral sendiri di mana dia bukan lagi menjadi " *good boys, good girls* " apa yang dia lihat tidak benar/salah maka akan di katakan pula tidak benar/ salah, begitupun sebaliknya.

Kemampuan membaca psikologis mahasiswa yang mekanik akhirnya membawa pihak kampus

kedalam satu sikap yang arogan dalam menghadapi mahasiswa terlebih sampai adanya kebijakan DO/Skorsing, karena menurutnya hukuman dalam dunia pendidikan dipakai seminimal mungkin, khususnya mekanisme DO/ Skorsing seharusnya menjadi pilihan terakhir apabila tindakan yang dilakukan berakibat adanya korban (seperti tindakan kekerasan didalam dunia pendidikan / bullying), peringatan ataupun teguran dapat di terapkan kepada mahasiswa dalam mendisiplinkan mahasiswa. Seharusnya hukuman di fungsikan untuk menghilangkan Perilaku – perilaku yang tidak diinginkan paparnya .

Lalu yang menjadi pertanyaan apakah kekritisan berpikir mahasiswa yang tercermin dalam aktifitas politiknya di dalam kampus saat ini merupakan perilaku – perilaku yang tidak diinginkan (pihak kampus)? jawaban dari pertanyaan tersebut tentunya dapat kita relasikan dengan ulasan Paulo Freire mengenai paradigma kesadaran pendidikan, mekanisme DO/ Skorsing dapat kita lihat sebagai

Mahasiswa dalam berpikir dan bertindak sudah dalam tahapan memiliki kode moral sendiri di mana dia bukan lagi menjadi " *good boys, good girls* " apa yang dia lihat tidak benar/salah maka akan di katakan pula tidak benar/ salah, begitupun sebaliknya

salah satu bentuk paradigma kesadaran Naif di mana Mahasiswa dijadikan akar penyebab masalah, sistem pendidikan saat ini yang mengakibatkan mahal biaya



pendidikan, Kualitas yang rendah, fasilitas yang minim, dll (kapitalisasi pendidikan – red) dimaknai merupakan kondisi yang sudah baik dan benar, sehingga tidak perlu di pertanyaan terlebih lagi oleh mahasiswa, dalam hal ini di perlukan cara – cara untuk “membuat, mengarahkan sampai memaksakan” agar Mahasiswa dapat beradaptasi dan menerima sistem tersebut (kapitalisasi pendidikan – red) walaupun dengan tindakan – tindakan yang arogan dan represif seperti men DO / men Skorsing Mahasiswa - mahasiswa Progresif yang menuntut Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan bervisi kerakyatan.

Hegemoni kapitalisasi pendidikan mengakibatkan hilangnya filosofis pendidikan

(memanusiakan manusia), menjauhkan Mahasiswa terhadap realitas kampus dan masyarakat yang seharusnya menjadi *basic science* keilmuannya. Serta hanya menciptakan manusia – manusia egois (meminjam sindiran HAR Tilaar Guru Besar Emiretus UNJ). Dengan kata lain Mahasiswa selalu di tempatkan dalam posisi sebagai obyek pendidikan yang akhirnya juga menimbulkan paradigma kesadaran Magis dimana timbulnya kesadaran tanpa dapat merelasikan sebab akibat yang ada di masyarakat dan menerima semua hal secara dogmatis (termasuk kebenaran terhadap sistem hari ini serta dampak – dampak yang dirasakan oleh Mahasiswa dan Rakyat Indonesia). Selama mahasiswa tidak pernah di jadikan

subyek pendidikan & kekritisannya selalu di hadapkan dengan Mekanisme DO / Skorsing, maka selama itu pula pendidikan akan tersesat jauh dari Filosofisnya sebagai proses memanusiakan manusia dan Paradigma kesadaran kritis yang merupakan proses untuk melatih peserta didik agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dari sistem dan struktur yang ada, menganalisis mekanisme kerjanya, serta berusaha merumuskan bagaimana mentransformasikannya menjadi tata kehidupan yang lebih adil. Dan akhirnya Selamat menjadi manusia – manusia egois.

Tablel, kebijakan drop out , dan skorsing terhadap aktifitas politik mahasiswa

Kasus	Korban	Latar Belakang kasus	Bulan / Tahun
Kebijakan Skorsing dan Drop Out	Drop out Ketua BEM FH <i>Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta</i>	Mahasiswa melakukan aksi selebaran tentang fasilitas kampus, dan menempelkan selebaran yang memprotes kebijakan SBY-JK	April 2007
	Drop outnya 3 Mahasiswa <i>UAD Yogyakarta</i>	Mahasiswa melakukan apresiasi seni yang mengkritisi kebijakan kampus yang tidak demokratis	Mei 2007
	Diskorsingnya 3 Mahasiswa <i>ITS Surabaya</i>	Mahasiswa melakukan seminar Jalanan yang membongkar keterlibatan ITS dalam proses penelitian eksplorasi PT.Lapindo di Sidoarjo	Mei 2007
	5 Mahasiswa DO, 2 Mahasiswa Skorsing <i>STIEM Bongayya, Makassar</i>	Melaksanakan aktifitas penerimaan mahasiswa baru (PMB)	Agustus 2007
	32 mahasiswa di skors, dan 12 orang mahasiswa di Drop Out. <i>Univ. HKBP Nomensesn-Medan</i>	Mahasiswa melakukan aksi di kampus, sebagai bentuk protes terhadap pengambil alihan kewenangan kegiatan orientasi mahasiswa 2007	September 2007
Intimidasi Birokrasi kampus terhadap aktifitas politik mahasiswa	Diintimidasinya ketua BEM FH, dan mahasiswa di FH USAKTI dengan Lembaga Komisi Displin <i>Univ. Trisakti- Jakarta</i>	Mengkritik pengelolaan keuangan kampus yang tidak transparan dan melakukan aksi tanda tangan menuntut fasilitas kampus	Mei 2007
	Pembrangusan Keluarga Mahasiswa Seni Rupa (KMSR) dan pemotongan jumlah SKS	Ditetapkannya kebijakan yang tidak demokratis dengan SE No. 1188/k01.4/KM/2007. tentang pelarangan Orientasi mahasiswa 2006.	Agustus -2007
	Ancaman Pembredelan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Hukum Univ. Trisakti - Jakarta	Tuduhan terhadap anggota LPM sebagai organisasi terlarang (Komunis / PKI).	September 2007



Persiapkan Kesadadaran Massa Dengan Pendidikan Politik

"Salah Satu Tugas Utama Gerakan Massa yang berkarakter Progresif adalah, Mempersiapkan, Membangun Kesadaran Politik Massa dengan memberikan Pendidikan Politik secara tepat..., sehingga lahirah perlawanan sekaligus perjuangan yang dahsyat, Karena Massa yang melakukan perlawanan dan perjuangan itu terdidik pikiranya, terorganisir sikapnya dan dipimpin tindakanya"



Yusriansyah, Ketua Umum Komite Pimpinan-Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia.

Suatu masyarakat dapat dikatakan telah mencapai tingkat kebudayaan yang tinggi, karena maju dalam pengembangan teknologinya (arsitektur, irigasi, tata kota, jalur dan sarana transportasi darat, laut dan udara, dll), maju perekonomiannya (suatu sistem produksi dari corak produksi yang menggunakan tenaga tangan mulai tergantikan dengan industri manufaktur), dan maju tingkat pola pikir masyarakatnya salah satunya adalah mulai mengenal organisasi modern sebagai sebuah sistem dan alat perjuangan kolektif untuk memajukan taraf kesadaran politik massa. Ribuan bukti sejarah perjuangan manusia di seluruh dunia dapat dijadikan dasar untuk melihat hal tersebut.

Selanjutnya dalam praktek kehidupan sehari-hari, sebuah organisasi di hadapkan pada tuntutan untuk melakukan upaya sistematis dalam persoalan konsolidasi teori maupun massa yang akan dibawa berjuang dengan segenap potensi dan energi berlawanan dalam menghancurkan musuh-musuh utama rakyat dan selanjutnya bersama-sama dukungan penuh dari kekuatan pokok rakyat, yakni kelas proletar yang kokoh dan berhari

depan untuk membangun dan menegakan demokrasi yang sejati.

Inilah yang harus yang dipahami, mungkin harus diwaspadai oleh keseluruhan anggota dan massa di organisasi kita. Lihatlah situasi dan kondisi ekonomi politik, social budaya nation ini sudah dapat dikatakan mengkristal menjadi sistem sosial yang mensyaratkan secara material masih dibawah penindasan dan penghisapan manusia atas manusia. Sistem itu tiada lain adalah kapitalisme yang bergerak dan memuncak sampai level yang tertinggi.

Kenyataan itu di tambah lagi keadaan obyektif tata social politik Indonesia yang makin hari-makin tidak menunjukkan keperpihakan kepada massa konstituenya manakala rezim komprador yang berkuasa dalam tindak tanduk politiknya masih mempraktekan apa saja yang diperintahkan oleh kaum pemodal yang berpusat di negeri-negeri kapitalisme utama maupun di lembaga-lembaga moneter internasional, sehingga arus demokratisasi yang bergerak sejak reformasi digulirkan terinterupsi dan di buat semakin mendekat ke sistem yang liberal.

Imperialisme (penjajahan gaya baru) yang membangun persekutuan di negeri ini dengan para kompradornya mulai jaman kolonialisme

(Belanda, Inggris) Jepang, ORLA dan dilanjutkan sampai kekuasaan tangan besi ORBA bahkan sampai detik ini, Mereka masih memainkan mesin-mesin penindasannya. Otomatis hal ini membuat golongan reaksioner dalam maupun luar negeri *mendapatkan syarat-syarat material untuk terus melaksanakan penjajahan, pembodohan, dan hegemoni alias pengilusan kesadaran berlawanan dari kekuatan paling progresif dan revolusioner dalam zaman ini yakni massa rakyat pekerja.*

Sadar-sesadarnya bahwa keadaan massa saat ini, memang lahir ditengah iklim yang liberal penuh dengan kepalsuan dan janji-janji manis tentang kecantikan dan keberhasilan kapitalisme diberbagai belahan dunia,- yang diperkenalkan lewat salah satu alat ideologinya yang cukup ampuh yaitu sekolahan/universitas maupun penguasaan media massa.

Karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi organisasi gerakan untuk mengimbangi langkah dan tindakan mereka yang hegemonik dan sistematis dari mereka, dengan membuat, menyiapkan kemudian menjalankan sistem pendidikan yang progresif (teori maupun praktek) kepada massa anggota secara sistematis, bertahap, tematik yang bertujuan untuk menghancurkan ilusi sesat dalam pikiran massa (baik yang



berkembang maupun akan muncul). *Usaha pendidikan politik, pelatihan skill gerakan, kursus-kursus pengenalan stratak organisasi kepada massa anggota adalah bagian pokok yang paling fundamental dari pekerjaan sehari-hari organisasi untuk mempersempit jurang atau taraf kesadaran didalam massa organisasi kita.*

Memahami bahwa persoalan pengenalan dan tahap pembangunan kesadaran politik massa itu tidaklah gampang, karena pemahaman massa itu secara obyektif berlapis-lapis sesuai dengan keadaan sosial yang turut menentukan terbentuknya kesadarannya. Dalam hal ini dapat digolongkan dalam beberapa jenis dan karakternya, yaitu; massa maju dan massa terbelakang. Tentu saja masing-masing jenis massa itu memiliki kebutuhan dan kesadaran yang berbeda-beda diantara satu jenis dengan jenis yang lain, tapi *organisasi dilahirkan untuk mempersempit jurang perbedaan taraf kesadaran dan pemahaman di antara mereka.* Sementara pada sisi yang lain program-program dan rangkaian aksi (praktek edukasi, aksi massa dll) yang telah disusun, secara substansi memang seyogyanya dipahami secara tepat oleh petugas organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya itu tidak muncul persoalan-persoalan teknis dilapangan.

Setelah memahami, menyerap, menganalisa dan menyimpulkan pikiran dan kebutuhan massa, tentu sangat konyol apabila pelaksanaan agenda pokok internal organisasi yang diturunkan dalam kerjasama pendidikan massa dilaksanakan secara formalistik belaka (gugur ke-

wajiban), sehingga bisa diprediksi hasil yang di capai dalam proses edukasi tersebut pasti menghasilkan anggota-anggota yang tidak memiliki perspektif lengkap tentang masalah-masalah pokok rakyat dan gerakannya, bisa jadi situasi kerja edukasi dalam organisasi-organisasi progresif bisa di tetapkan sebagai salah satu bagian otokratis dari gerakan rakyat di Indonesia saat ini.

Lantas apa yang menjadi arti penting dari perencanaan dan praktek kerja pendidikan di organisasi massa progresif, **Pertama** : Sebagai usaha awal untuk menghindari salah pemahaman dan sasaran atas materi-materi pendidikan pada massa. **Kedua** : Sebagai usaha untuk menghancurkan pikiran palsu dikalangan massa anggota dan massa luas, yang muncul akibat kerasnya proses penjajahan dan hegemoni pendidikan ala kapitalisme, yang selalu menghasilkan manusia-manusia pragmatis dalam berpikir, bersikap dan bertindak. **Ketiga**: Tentu saja hal ini juga sebagai, penjabaran dari prinsip kerja gerakan massa, yaitu Tentang Garis Massa yakni; *bertolak Dari Kepentingan Massa Dan Bertindak Sesuai Dengan Kesiapan Massa.*

Bertolak dari kepentingan massa, dapat kita simpulkan melalui analisa sejarah / sosiologi masyarakat Indonesia yang harus dibebaskan dan dituntaskan dengan menghancurkan musuh rakyat yaitu, Imperialisme. Sementara, Bertindak sesuai dengan kesiapan massa memiliki **Dua Pengertian** yaitu; **Satu**, Bahwa organisasi gerakan itu dimanapun saja sector dan teritorinya (buruh, tani, mahasiswa, dan borjuis kecil

progresif lainnya) pasti mengemban keharusan dan tanggung jawab untuk mendidik massa yang bertujuan mengganti dan menyuntik kesadaran palsu massa dengan teori dan praktek yang maju, yang bisa dikemas dalam program-program dikpol, kurpol, workshop, pelatihan-pelatihan skill dan pengenalan stratak organisasi untuk membangun kesiapan massa *sehingga akan lahir para pimpinan massa yang lahir dari praktek perjuangan.* **Dua**, Organisasi gerakan tentu tidak boleh menolak massa sadar berapapun jumlahnya dan kualitasnya, karena kalau kita tolak tentu organisasi kehilangan kesempatan dalam membarengi atau memimpin kesadaran massa.

Hal diatas penting untuk dipahami oleh para pimpinan dan anggota organisasi, maka akan sedikit banyak membantu pekerjaan *penyebaran gagasan dan ide maju kekalangan massa.* Sehingga hasil dari proses penyelenggaraan pendidikan politik SMI, selalu bersinergi praktek-praktek kongkrit perjuangan massa rakyat dengan bersama gerakannya yang kian hari makin bangkit membesar di tanah air ini.





Sebuah sketsa dari I smed, anggota SMI Cabang Jakarta, yang menggambarkan sebuah sketsa dari Paulo Freire, Tokoh pendidikan dari Brazil. Ia merekonstruksi prespektif pendidikan menjadi kritis, demokratis, dan progresif. Dalam bukunya pedagogy of the oppressed (pendidikan kaum tertindas), ia memperkenalkan pendidikan yang lebih partisipatif bagi kaum tertindas, dan hal tersebut ia wujudkan di daerah perkampungan kumh di Brazil



Belajar, berjuang, mengabdikan, untuk perubahan sejati....!!!

Serikat Mahasiswa Indonesia

January

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

February

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	

March

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	20	21	29
30	31					

April

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

May

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

June

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

July

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

August

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

September

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

October

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

November

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

December

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- 1 Jan - Tahun baru 2008
- 10 Jan - Tahun baru 1429 Hijriah
- 7 Feb - Tahun Baru Imlek
- 7 Mar - Hari raya Nyepi
- 20 Mar - Maulid Nabi Muhammad SAW
- 21 Mar - Wafat Isa Almasih
- 1 Mei - Kenaikan Isa Almasih
- 20 Mei - Hari Raya Waisak 2552
- 30 Juli - Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- 18 Aug - Hari libur proklamasi RI
- 1 - 2 Okt - Hari Raya Idul Fitri 1429 H
- 8 Des - Idul Adha 1429 H
- 25 Des - Hari Raya Kelahiran Isa Almasih
- 29 Des - Tahun Baru 1430 H

**NATIONAL
CELEBRATION DAY**

- 22 April - Hari Bumi
- 1 Mei - Hari Buruh Internasional (may day)
- 2 Mei - Hari Pendidikan Nasional
- 12 Mei - Tragedi Trisakti
- 20 Mei - Peringatan Reformasi
- 17 Aug - Harlah Serikat Mahasiswa Indonesia
- 24 Sept - Hari Tani Nasional
- 28 Okt - Sumpah Pemuda
- 26 Nov - Hari Perempuan Internasional
- 10 Des - Hari Hak Asasi Manusia Internasional
- 18 Des - Hari Buruh Migrant Internasional

MOVEMENT DAY

Renungan bagi "sang intelektual" dalam
gemerlapnya natal...!!

Ditengah semakin menggilanya bencana kemanusiaan, dimana ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal, ribuan orang tua kehilangan mata pencaharian, dan jutaan anak kehilangan masa depannya, mereka diterjang oleh bencana alam, bencana kecelakaan, serta bencana lain akibat keserakahan

menurutmu dimanakah kita, "kaum mahasiswa", akan lahir, besar, dan mempergunakan ilmu kita ..???

Apakah didalam gemerlapnya gedung-gedung besar milik perusahaan internasional yang menghisap kesejahteraan rakyat...

Ataukah

Ditengah gelap dan kotornya kontrakan di perkampungan buruh, dan ditengah sunyinya desa-desa para petani yang sudah mulai ditinggalkan..



Hiduplah dengan semangat PEMBEBASAN dan pilihan seperti yang DIPILIH Yesus Kristus pilih..Ditengah kandang domba yang kotor dan gelap...